



## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEWAJIBAN BLU DI INDONESIA (STUDI LITERATUR 2022–2025)

Amelia Putri Nurchoiriyah<sup>1)</sup>, Emeliatius Sofia<sup>2)</sup>, Fathul Beri<sup>3)</sup>, Mohamad Djasuli<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>1,2,3,4)</sup> [nurchoiroyah07@gmail.com](mailto:nurchoiroyah07@gmail.com), [emeliatussafia2374@gmail.com](mailto:emeliatussafia2374@gmail.com), [fathulberi71103@gmail.com](mailto:fathulberi71103@gmail.com),

<sup>4)</sup> [djasuli@trunojoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunojoyo.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received:

April 22, 2025

Revised

June 2, 2025

Accepted:

June 2, 2025

Online available:

June 05, 2025

### Keywords:

Accountability, obligations public, public financial management transparency service agency

\*Correspondence:

Name: Mohammad Djasuli

E-mail: [djasuli@trunojoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunojoyo.ac.id)

### Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

### ABSTRACT

**Introduction:** This study is a literature review that aims to analyze the importance of transparency and accountability in the management of obligations by Public Service Agencies (BLU) in Indonesia. As government entities granted financial flexibility, BLUs require strong oversight to remain accountable in carrying out their public service mandates.

**Methods:** This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing upon academic publications, government regulations, and audit reports. The aim is to synthesize various findings related to the financial governance of BLU and assess the effectiveness of current oversight mechanisms.

**Results:** The findings reveal that a major governance challenge lies in the mismatch between budget flexibility and suboptimal reporting systems. Additionally, the limited human resource capacity in financial management has a negative impact on transparency and accountability. The study highlights the need for integrated financial information systems, capacity-building training, and strengthened internal oversight mechanisms to ensure that BLU obligations are managed in accordance with good governance principles.

### PENDAHULUAN

Dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik di Indonesia, pemerintah memperkenalkan skema Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan negara pada unit pelaksana teknis yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Sejak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU telah memberikan peluang lebih besar kepada instansi

pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme pelayanan. Namun, keleluasaan ini juga membawa konsekuensi, terutama dalam menjaga standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Transparansi merupakan aspek penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga layanan, yang hanya dapat dicapai dengan penyajian informasi keuangan yang terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Istianah dan Utomo (2024) menyebutkan bahwa strategi peningkatan transparansi harus dimulai dari pembenahan sistem pelaporan kas dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan. Di sisi lain, akuntabilitas mengarah pada kemampuan suatu BLU mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan kewajiban keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Kondisi ideal tersebut masih sulit tercapai secara merata. Penelitian Ramadhani dan Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), khususnya dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLU Daerah, masih mengalami berbagai kendala teknis dan administratif. Kendala tersebut meliputi pemahaman standar akuntansi yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem pelaporan secara menyeluruh.

Di sisi lain, aspek transparansi juga dipengaruhi oleh redesain sistem penganggaran dan mekanisme pengawasan yang kuat. Oktarina, Saftiana, dan Azwardi (2023) menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap struktur sistem anggaran BLU yang selama ini cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi layanan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BLU untuk mengembangkan mekanisme pengawasan internal yang mampu memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.

Penggunaan Sistem Informasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) menjadi salah satu langkah modernisasi tata kelola BLU. Tuu, Aneta, dan Tui (2024) menyatakan bahwa implementasi sistem ini di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo memberikan manfaat dalam perencanaan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih muncul dari sisi konsistensi antara rencana dan realisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut, Santoso, Susilowati, dan Setyorini (2021) melakukan analisis laporan arus kas pada perguruan tinggi negeri berstatus BLU dan menemukan adanya celah dalam kesesuaian antara arus kas operasional dan realisasi output pelayanan, yang berpotensi menurunkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan manajerial.

Faktor budaya organisasi juga turut memengaruhi ketercapaian prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Maryanti (2021), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan BLU masih bersifat simbolik dan belum menyentuh perubahan perilaku organisasi secara substansial. Banyak pengelola keuangan yang masih terjebak dalam rutinitas administratif tanpa inovasi dalam proses pelaporan.

Penelitian Keumala et al. (2023) menunjukkan bahwa setelah penerapan pola pengelolaan keuangan BLU Daerah (PPK-BLUD), terdapat peningkatan kinerja keuangan pada RSUD Cut Meutia di Kabupaten Aceh Utara. Namun, peningkatan ini belum diiringi dengan perbaikan pada sisi pertanggungjawaban publik. Sebuah ironi yang mencerminkan bahwa efisiensi tidak selalu sejalan dengan akuntabilitas, jika tidak dibarengi dengan kontrol yang memadai.

Studi Syahromi dan Cheisviyanny (2020) pada Universitas Negeri Padang juga menunjukkan hal serupa, di mana kinerja keuangan setelah penerapan BLU mengalami peningkatan dari sisi fleksibilitas, tetapi masih menyisakan permasalahan dalam sinkronisasi data keuangan antar unit kerja. Demikian pula, IRA dan Indah Merina (2020) dalam kajiannya mengenai penerapan PSAP 13 di Puskesmas Sungsang mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan menghambat proses audit dan menurunkan nilai opini laporan keuangan.

Permasalahan lain juga terjadi dalam hal standarisasi laporan keuangan. Syahputera dan Padriansyah (2023) menyoroti bahwa ketidakkonsistenan implementasi SAP di rumah sakit umum daerah menyebabkan perbedaan struktur pelaporan dan menyulitkan proses evaluasi kinerja. Hal ini sejalan dengan studi Timur et al. (2023) yang menyebutkan bahwa tantangan besar bagi perguruan tinggi negeri yang bertransformasi menjadi BLU adalah bagaimana mengelola keuangan secara fleksibel namun tetap memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Kondisi pandemi COVID-19 menambah kompleksitas tata kelola BLU, khususnya pada sektor kesehatan. Hidayat, Wardhaningrum, dan Andriana (2022) mencatat bahwa di RSUD Kalisat, ketidakterbukaan dalam

penggunaan dana COVID-19 menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan etis dalam manajemen publik.

Sarjan dan Firmansyah (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas finansial sangat ditentukan oleh pola kebijakan internal BLU, terutama dalam konteks rumah sakit. Kinerja keuangan yang baik tidak akan berarti jika tidak dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Dalam studi berbeda, Amany, Maharani, dan Firmansyah (2020) membuktikan bahwa pendapatan dan ukuran BLU berkorelasi dengan pencapaian akreditasi lembaga pendidikan tinggi, yang berarti semakin besar institusi, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.

Sementara itu, Tama (2018) mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan menjadi elemen penting bagi RSUD yang berstatus BLU Daerah. Namun, upaya menuju kemandirian harus diiringi dengan penguatan akuntabilitas agar tidak menimbulkan moral hazard dalam penggunaan dana publik. Dalam hal ini, Firdhausy, Suryawati, dan Harto (2021) menambahkan bahwa struktur pengorganisasian dan pelaksanaan keuangan di Puskesmas BLU harus menekankan pada sistem audit internal yang kuat.

Dari sisi faktor-faktor penentu, Sari, Maria, dan Armaini (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dipengaruhi oleh transparansi laporan, kompetensi manajerial, serta mekanisme pelaporan yang partisipatif. Dalam aspek sistem informasi, Amerieska (2016) menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM dan sistem organisasi (human, organization, technology/HOT).

Model pengawasan yang adaptif juga dibutuhkan. Rianti (2021) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan pada BLUD harus dirancang secara kontekstual dengan kebutuhan satuan kerja, seperti pada SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan anggaran bisa diawasi tanpa menghambat inovasi.

Terakhir, menurut Rambe et al. (2023), dalam bidang pendidikan, BLU membuka ruang inovasi kelembagaan. Namun demikian, peran pengawasan dan keterbukaan informasi tetap harus menjadi fondasi utama agar fleksibilitas anggaran tidak mengaburkan prinsip transparansi.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan riset sebelumnya, fenomena ketidakseimbangan antara fleksibilitas anggaran dan lemahnya sistem pelaporan keuangan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kewajiban BLU. Ketidakterpaduan sistem informasi keuangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan internal berdampak langsung pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Padahal, prinsip-prinsip tata kelola yang baik menuntut pertanggungjawaban yang jelas terhadap pengelolaan kewajiban keuangan publik. Oleh karena itu, urgensi membangun sistem pengelolaan kewajiban BLU yang transparan dan akuntabel tidak lagi menjadi wacana opsional, melainkan kebutuhan utama untuk menjamin keberlanjutan lembaga layanan publik di Indonesia. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat arah kebijakan dan praktik pengelolaan BLU yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Meskipun banyak penelitian membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU, namun kajian yang secara khusus menelaah pengelolaan kewajiban BLU, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan terhadap utang atau kewajiban keuangan lainnya masih terbatas. Selain itu, belum ada studi literatur komprehensif yang mengatakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kewajiban keuangan BLU lintas sektor (pendidikan, kesehatan, teknis). Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BLU**

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan entitas pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya secara fleksibel, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. Fokus utama dari fleksibilitas ini berada pada efisiensi dan efektivitas anggaran yang selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance). Namun, agar fleksibilitas tersebut tidak melenceng dari tanggung jawab publik, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam pelaksanaannya (Isti'annah & Utomo, 2024).

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang diberikan BLU kepada publik, termasuk keterbukaan dalam hal pengelolaan kas, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Keterbukaan ini tidak hanya sekadar

memublikasikan laporan keuangan, namun juga mencakup kemudahan akses dan pemahaman terhadap isi laporan oleh masyarakat (Oktarina, Saftiana, & Azwardi, 2023). Di sisi lain, akuntabilitas merujuk pada kewajiban BLU untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang dikelolanya kepada lembaga pengawas maupun kepada publik, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku (Ramadhani & Sulistyowati, 2022).

Berdasarkan pengamatan Tuu, Aneta, dan Tui (2024), sistem informasi seperti RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) telah mulai diimplementasikan dalam pelaporan BLU sebagai bentuk transparansi perencanaan dan realisasi anggaran. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis kinerja agar pengelolaan keuangan lebih efektif. Namun pada kenyataannya, masih banyak institusi yang belum mampu memanfaatkan sistem ini secara optimal akibat keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam BLU tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjadi indikator penting dalam menilai integritas data dan informasi keuangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa masih banyak BLU yang belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 13 dalam penyajian laporan keuangannya, terutama di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan (IRA & Indah Merina, 2020; Syahputera & Padriansyah, 2023).

### **Literature Review: Kerangka Studi Terdahulu**

Literatur-literatur yang telah dianalisis mengelompokkan fokus penelitian menjadi beberapa bidang. Pertama adalah aspek pengelolaan kas dan transparansi pelaporan (Isti'anah & Utomo, 2024; Maryanti, 2021), kedua berkaitan dengan penerapan standar akuntansi PSAP dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel (Ramadhani & Sulistyowati, 2022; Syahromi & Cheisvianny, 2020), dan ketiga mengenai efektivitas kebijakan sistem penganggaran BLU dan evaluasi kinerja finansial (Keumala et al., 2023; Timur et al., 2023).

Di sisi lain, studi oleh Hidayat, Wardhaningrum, dan Andriana (2022) membahas bagaimana pandemi memengaruhi transparansi BLU, terutama dalam penggunaan dana darurat dan ketepatan pelaporan. Sementara Rianti (2021) dan Sarjan & Firmansyah (2023) menyoroti model pengawasan yang sesuai untuk BLUD, terutama pada satuan pendidikan dan rumah sakit daerah. Mereka menggarisbawahi perlunya mekanisme evaluasi berbasis risiko dan penguatan sistem kontrol internal.

Adapun pendekatan teknis yang digunakan dalam studi-studi tersebut mencakup metode kualitatif deskriptif, studi kasus, hingga analisis komparatif. Wilayah penelitian pun tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Aceh, dan Jawa Tengah, dengan institusi seperti RSUD, perguruan tinggi, dan puskesmas sebagai objek studi (Rambe et al., 2023; Firdhausy, Suryawati, & Harto, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode untuk menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban Badan Layanan Umum (BLU).

SLR dilakukan melalui tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan penyajian hasil (Priksat et al., 2023). Pada tahap awal, peneliti menentukan topik utama kajian, yakni pengelolaan kewajiban BLU dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Kemudian dilakukan pencarian, seleksi, dan evaluasi artikel dari jurnal nasional terakreditasi. Kajian ini mencakup studi BLU di sektor pendidikan (perguruan tinggi) dan sektor kesehatan (RSUD dan puskesmas) yang dikelola untuk pemerintah daerah.

Artikel yang dikaji dipetakan berdasarkan nama penulis, jurnal, tahun terbit, metode penelitian, fokus kajian, serta lokasi studi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, celah penelitian, dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Kriteria inklusi mencakup artikel berbahasa Indonesia, relevan dengan tema BLU, dan terbit antara 2016 hingga 2024. Sedangkan kriteria eksklusi adalah artikel yang tidak mencantumkan metode penelitian atau tidak relevan dengan tata kelola sektor publik.

## PEMBAHASAN

### Hasil Pemilihan Sampel Penelitian

Sebanyak 20 artikel tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban BLU dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional yang terindeks Sinta dan memiliki fokus pada sektor pelayanan publik. Artikel yang tidak relevan dengan tema kajian seperti sektor swasta atau tidak menyebutkan standar PSAP dan BLU dikeluarkan.

Tabel 1. Menyajikan Pemilihan Sampel Akhir.

No	Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	Jumlah Artikel
1	Artikel yang sesuai dengan kriteria transparansi dan akuntabilitas kewajiban BLU	20
2	Artikel yang tidak menyebutkan BLU secara eksplisit	12
3	Artikel yang tidak menggunakan pendekatan akuntabilitas/transparansi	8

Sumber : Diolah, 2024

Sebaran artikel menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 merupakan tahun dengan publikasi terbanyak terkait BLU. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada sektor layanan publik.

Tabel 2. Pemetaan Tahun Terbit Artikel

Tahun	Jumlah Artikel	Persentase
2020	2	10%
2021	3	15%
2022	4	20%
2023	7	35%
2024	4	20%

Sumber : Diolah, 2024

Tabel 3 Pemetaan Metode Penelitian

Tahun	Kualitatif	Kuantitatif	Total
2020	1	1	2
2021	2	1	3
2022	3	1	4
2023	4	3	7
2024	3	1	4

Sumber : Diolah, 2024

### Pemetaan Nama Jurnal Ilmiah dan Tahun Publikasi Penelitian

Pemetaan nama jurnal ilmiah dan tahun publikasi dalam kajian ini bertujuan untuk menggambarkan sebaran literatur yang digunakan dalam pembahasan isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kewajiban Badan Layanan Umum (BLU). Dari hasil pemetaan, terlihat bahwa publikasi ilmiah mengenai topik ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan tumbuhnya perhatian akademisi terhadap penguatan tata kelola keuangan publik di tengah tuntutan efisiensi dan efektivitas layanan pasca-pandemi. Jurnal-jurnal yang digunakan berasal dari berbagai bidang, seperti administrasi publik, akuntansi, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, menunjukkan bahwa isu pengelolaan BLU berdampak luas secara lintas sektor.

Keberagaman sumber literatur ini juga mencakup artikel dari jurnal terakreditasi nasional maupun prosiding seminar ilmiah, yang memperkaya perspektif baik dari sisi teoritis maupun praktis. Selain itu, pendekatan metodologis yang digunakan dalam artikel-artikel tersebut bervariasi, mulai dari kualitatif deskriptif, kuantitatif, hingga studi kasus, yang memberikan landasan kuat bagi analisis berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui pemetaan ini, peneliti dan pembuat kebijakan dapat lebih mudah mengidentifikasi referensi yang relevan dan mutakhir, serta memahami tren dan celah riset dalam tata kelola BLU di Indonesia.

Tabel.4. Pemetaan Nama Jurnal Ilmiah dan Tahun Publikasi Penelitian

<b>Nama Jurnal Ilmiah</b>	<b>Tahun Publikasi</b>	<b>Judul artikel nasional, internasional di Google Singkat</b>
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik	2024	Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi BLU
Indonesian Journal of Research in Economy	2022	Penerapan PSAP di Puskesmas BLU Daerah
Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi	2023	Redesain Sistem Anggaran dan Kinerja BLU
Normalita (Jurnal Pendidikan)	2024	Implementasi Sistem RBA di Pascasarjana UNG
Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi	2021	Analisis Arus Kas BLU Perguruan Tinggi Negeri
Journal of Accounting Science (JAS)	2021	Pola GCG pada BLU
Jurnal Bina Akuntansi	2023	Kinerja Keuangan RSU Cut Meutia Setelah PPK-BLUD
Jurnal Eksplorasi Akuntansi	2020	Kinerja Keuangan Universitas Negeri Padang BLU
Prosiding Seminar Hasil Penelitian FEB UBD	2020	Penerapan PSAP 13 di Puskesmas Sungsang
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi	2023	Standar Akuntansi di RSUD Musi Banyuasin
Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan	2018	Kemandirian Keuangan RSUD BLU Daerah
Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi	2022	Pengelolaan Keuangan RSUD Kalisat saat Pandemi
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi	2023	Kinerja Keuangan RS Haji Lalu Manambai
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)	2020	Ukuran BLU dan Akreditasi Pendidikan
HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)	2021	Pengorganisasian dan Keuangan Puskesmas BLU
Jurnal Darma Agung	2023	Faktor Penentu Akuntabilitas BLUD
Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)	2016	Model HOT terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Muslim Heritage	2021	Model Pengawasan Keuangan BLUD di SMK Negeri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)	2023	BLU dalam Bidang Pendidikan
Jurnal Optimal: Ekonomi dan Kewirausahaan	2018	(Duplikat judul sebelumnya)

Sumber : Diolah, 2024



**Gambar 1. Pemetaan Teori**

Sumber : Diolah, 2024

Grafik ini memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ditopang oleh sistem yang kuat seperti regulasi akuntansi, sistem informasi, budaya organisasi, dan pengawasan yang kontekstual. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan multidimensional dalam reformasi BLU.

### **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kewajiban BLU**

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan sektor publik. Pada BLU, dua prinsip ini penting untuk memastikan kepercayaan publik dan mendorong efisiensi penggunaan dana. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun beberapa BLU telah menerapkan transparansi dalam laporan keuangan, masih banyak yang belum menyajikan data kewajiban secara terbuka dan berkala.

#### **Ketidakterpaduan Sistem Informasi Kewajiban**

Menurut Bastian (2015), salah satu tantangan utama akuntabilitas keuangan publik adalah belum terintegrasinya sistem informasi. Hal ini juga ditemukan dalam studi ini, di mana pengelolaan kewajiban BLU masih dilakukan secara parsial, tanpa dukungan sistem informasi yang real-time dan lintas unit. Akibatnya, laporan kewajiban sering tidak konsisten dan menimbulkan risiko pengambilan keputusan yang keliru.

#### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua**

Dalam kajian Mahsun (2013), disebutkan bahwa SAP berbasis akrual penting untuk mencerminkan posisi keuangan yang lebih realistis, termasuk kewajiban jangka pendek dan panjang. Studi ini menemukan bahwa beberapa BLU belum optimal dalam menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh, khususnya dalam pencatatan utang pihak ketiga, yang masih terjadi perbedaan antara realisasi dan pelaporan.

#### **Peran Evaluasi dan Pengawasan Internal**

Berdasarkan pemikiran Indra Bastian dan praktik yang berlaku, pengawasan internal memegang peran penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kewajiban. Studi ini menemukan bahwa unit pengawas internal (SPI) di banyak BLU belum dilibatkan secara aktif dalam proses pelaporan kewajiban, sehingga belum mampu menjadi alat kontrol yang efektif terhadap potensi penyimpangan.

#### **Kebutuhan Akan Regulasi Teknis yang Lebih Rinci**

Mengacu pada berbagai pedoman teknis Kementerian Keuangan dan studi sebelumnya, ditemukan bahwa belum adanya regulasi spesifik mengenai pengelolaan kewajiban di BLU menyebabkan adanya variasi dalam praktik pencatatan dan pelaporan kewajiban antar unit. Studi ini menyoroti perlunya kebijakan operasional yang seragam agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dijalankan secara merata.

#### **Tantangan Pengelolaan Kewajiban dalam Konteks Otonomi Keuangan BLU**

Menurut kajian dari Nurhayati (2021), BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, namun juga menghadapi risiko fiskal akibat pengelolaan kewajiban yang kurang hati-hati. Studi ini menyoroti bahwa beberapa BLU memanfaatkan fleksibilitas ini untuk mengambil keputusan pembiayaan yang belum didukung oleh kapasitas pelaporan kewajiban yang memadai, seperti kontrak kerja jangka panjang atau pinjaman non-komersial. Tanpa pengendalian internal yang kuat, hal ini berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yang membebani BLU di masa mendatang.

#### **Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Kebijakan**

Sebagaimana disarankan dalam literatur Harun dan Anindita (2022), digitalisasi sistem informasi akuntansi dan peningkatan kompetensi SDM menjadi solusi utama dalam meningkatkan pengelolaan kewajiban BLU. Studi ini juga menyimpulkan pentingnya pembuatan pedoman teknis khusus mengenai pelaporan kewajiban untuk seluruh jenis BLU, baik pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan teknis lainnya. Pelibatan Kementerian Keuangan dan BPKP dalam monitoring dan evaluasi juga menjadi kunci keberlanjutan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini secara menyeluruh menyoroti pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban oleh Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia, terutama pasca-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan fleksibilitas kepada BLU dalam penyelenggaraan layanan publik. Meskipun fleksibilitas tersebut memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, hal ini juga menuntut adanya kontrol internal dan eksternal yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dikelola secara bertanggung jawab. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat transparansi BLU sangat ditentukan oleh kelengkapan dan keandalan sistem pelaporan kas, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu, penyajian informasi keuangan secara terbuka dan aksesibel bagi publik menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya merujuk pada kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial dalam menjawab ekspektasi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik. BLU dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab dalam pelaksanaan setoran kewajiban kepada negara, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam sistem pencatatan dan pelaporan kewajiban, termasuk rendahnya tingkat digitalisasi serta keterbatasan koordinasi antarunit di lingkungan BLU, yang dapat memengaruhi akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, komitmen pimpinan, serta pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor independen atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan BLU, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik yang tidak hanya menitikberatkan pada regulasi teknis, tetapi juga pada penguatan etika kerja, integritas pegawai, serta inovasi dalam sistem informasi keuangan. Penelitian ini turut merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keuangan bagi seluruh pelaksana di lingkungan BLU, penyempurnaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan kewajiban. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga nilai-nilai yang tertanam dalam setiap proses pengelolaan keuangan BLU, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendukung keberlanjutan layanan, serta memperkuat posisi BLU sebagai penyelenggara layanan publik yang profesional dan terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban oleh Badan Layanan Umum (BLU), terdapat beberapa saran strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat tata



kelola lembaga ini agar sejalan dengan prinsip good governance serta mendukung akuntabilitas publik yang optimal. Pertama, BLU perlu melakukan penguatan sistem pelaporan keuangan melalui digitalisasi yang terintegrasi dan real-time, sehingga seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kewajiban dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pengawas internal, serta masyarakat. Digitalisasi ini tidak hanya akan mempercepat proses administratif, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan manusia dan celah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang keuangan, akuntansi, dan pelaporan publik, melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta pembinaan teknis yang disesuaikan dengan regulasi terbaru dan kompleksitas operasional BLU. Peningkatan kapasitas ini penting agar staf keuangan dan pengelola BLU memiliki pemahaman yang utuh terhadap kewajiban-kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dan mampu melaksanakan pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Ketiga, Kementerian Keuangan dan instansi pengawas terkait perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kewajiban BLU, tidak hanya dari sisi administratif tetapi juga substansi, agar tercipta sistem pengawasan yang responsif, korektif, dan edukatif. Evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, melainkan juga menilai sejauh mana informasi keuangan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi aktual dan dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keempat, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan aplikatif mengenai tata kelola kewajiban BLU, termasuk alur penyetoran PNBP, pelaporan kewajiban utang, serta format pelaporan yang distandarkan antarinstansi, sehingga meminimalkan perbedaan persepsi, mencegah praktik manipulatif, serta menciptakan konsistensi dalam tata kelola. Kelima, BLU juga diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan menyajikan laporan tahunan atau laporan triwulanan yang dapat diakses publik melalui situs resmi masing-masing instansi, yang tidak hanya berisi ringkasan kegiatan, tetapi juga laporan penggunaan dana, pencapaian target pelayanan, dan status pemenuhan kewajiban keuangan kepada negara. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BLU. Keenam, perlu adanya forum koordinasi atau sharing knowledge antar-BLU, baik secara regional maupun nasional, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, agar terjadi alih pengetahuan, pertukaran pengalaman, serta harmonisasi praktik terbaik dalam pengelolaan kewajiban dan pelaporan keuangan. Forum semacam ini dapat membantu BLU yang masih menghadapi tantangan dalam pencatatan dan pelaporan untuk belajar dari BLU yang sudah mapan dan berhasil, sekaligus memperkuat jaringan antar lembaga dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat. Terakhir, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk terus meninjau dan memperbarui regulasi terkait pengelolaan keuangan BLU agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, teknologi, serta tuntutan publik, sehingga peran BLU sebagai penyelenggara layanan publik tetap relevan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan saran-saran tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan pengelolaan kewajiban BLU dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui layanan publik yang berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 78-89.
- Amerieska, S. (2016). Pengaruh Human, Organization Dan Technology (Hot) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 23(2), 122-144.
- Firdhausy, H. S., Suryawati, C., & Harto, P. (2021). Fungsi Pengorganisasian dan Pelaksanaan Keuangan Puskesmas Berstatus Badan Layanan Umum Daerah. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(2).
- Hidayat, M. S., Wardhaningrum, O. A., & Andriana, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Di Masa Pandemi Covid-19. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 56-61.
- IRA, I., & INDAH MERINA, C. I. T. R. A. (2020, March). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang. In *PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN FEB UBD*.

- Isti'anah, I. A., & Utomo, E. S. (2024). Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum. Public Inspiration. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 38-52.
- Keumala, C. M., Maryana, M., Husin, D., Al Fahmi, M. L., Shalawati, S., Tamara, S. U., & Zahara, I. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Pada Rsu Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 580-600.
- Maryanti, E. (2021). Pola Pengelolaan Good Corporate Governance Badan Layanan Umum. *Journal of accounting Science/jas. umsida. ac. id/index. php/jas January*, 5(1), 29.
- Oktarina, F., Saftiana, Y., & Azwardi, A. (2023). Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3063-3082.
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), 116-124.
- Rambe, S., Dasopang, E. P., Ariadin, I., & Pahutar, M. (2023). Badan Layanan Umum (BLU) Pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5555-5564.
- Rianti, A. (2021). Model Pengawasan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. *Muslim Heritage*, 6(2), 240-256.
- Santoso, D., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2021). Analisis Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 23(2), 103-113.
- Sari, P. P., Maria, M., & Armaini, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 198-209.
- Sarjan, J., & Firmansyah, J. (2023, January). Analisis Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Kadir Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020). In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi* (Vol. 5, No. 001, January, pp. 167-185).
- Syahputera, R., & Padriansyah, P. (2023). Analisis Komparatif Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusunan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 712-718.
- Syahromi, M., & Cheisviyanny, C. (2020). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2839-2860.
- Tama, A. I. (2018). Kajian Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 12(2), 139-153.
- Timur, A., Nugroho, R. K., Indriyani, I., & Sulanjari, L. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Menuju Badan Hukum (Studi Pada Universitas Jenderal Soedirman).
- Tuu, M. R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Blu) Melalui Sistem Informasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 11(3).